

Analisis Pengukuran Kinerja Efisien Dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023

Deswita Dwi cahyani¹, Gusti Silvana Amalia², Julia Aktaviani Putri³, Ananda Azzahrah Zahira⁴

Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

Email; 63220274@bsi.ac.id¹, 63220237@bsi.ac.id², 63220255@bsi.ac.id³, 63220859@bsi.ac.id⁴

Alamat: Jl. Kramat Raya No.98. Kwitang, Jakarta 10450

Korespondensi penulis: 63220274@bsi.ac.id

Abstract. Through budget performance measurement, government agencies can evaluate their performance. By understanding strengths and weaknesses, agencies can continuously make improvements, enhance operational efficiency, and achieve their set goals. Budget performance measurement also supports sustainable development goals by ensuring that budget allocations reflect priorities. The objective of this research is to determine the criteria for the level of efficiency and effectiveness of the realization of the regional budget expenditure of DKI Jakarta for the period 2020 - 2023. The method used in this research is quantitative descriptive analysis using efficiency and effectiveness measurements. The results of this study indicate that the level of efficiency of the DKI Jakarta regional budget for the period 2020 – 2023 is overall efficient. For the level of effectiveness of the regional budget in DKI Jakarta, it varies. The highest percentage of effectiveness in 2023 was 92.51%, categorized as effective. To improve the effectiveness and efficiency in budget management, it is recommended to conduct periodic evaluations.

Keywords: budget, efficiency, effectiveness

Abstrak; Melalui pengukuran kinerja anggaran, instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja mereka. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan, instansi dapat terus melakukan perbaikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan yang ditentukan. Pengukuran kinerja anggaran juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan prioritas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kriteria tingkat efisiensi dan efektifitas realisasi anggaran belanja daerah DKI Jakarta periode 2020 - 2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif menggunakan pengukuran efisiensi dan efektifitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi anggaran belanja daerah DKI Jakarta periode 2020 – 2023 secara keseluruhan efisien. Untuk tingkat efektifitas anggaran belanja daerah DKI Jakarta bervariasi. Presentase tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2023 sebesar 92,51% dengan kriteria efektif. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisien dalam pengelolaan anggaran untuk selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala.

Kata kunci: anggaran belanja, efisiensi, efektifitas

1. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi dan kemajuan pesat teknologi informasi, tuntutan akan transparansi atas pengukuran kinerja anggaran dalam pengelolaan keuangan publik semakin meningkat. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik dituntut untuk mengelola sumber daya dengan baik dan memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di Indonesia, hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Di Provinsi DKI Jakarta, sebagai ibu pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, penerapan SAP menjadi sangat penting. Dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu kunci untuk menciptakan kepercayaan publik. SAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memahami penggunaan anggaran dengan lebih baik.

Laporan keuangan daerah DKI Jakarta periode 2020-2023 menjadi waktu yang krusial bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan implementasi SAP. Tantangan yang dihadapi, seperti pemulihan pasca-pandemi dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mengharuskan pemerintah untuk memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga dapat diandalkan dalam pengukuran kinerja. Dengan adanya SAP, pengukuran kinerja pemerintah dapat dilakukan secara lebih objektif, memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap program dan kebijakan yang dijalankan.

Melalui pengukuran kinerja anggaran, instansi pemerintah dapat mengevaluasi kinerja mereka. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan, instansi dapat terus melakukan perbaikan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan yang ditentukan. Pengukuran kinerja anggaran juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan prioritas pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini penting untuk menciptakan dampak positif bagi Masyarakat DKI Jakarta, terutama dalam konteks isu-isu sosial dan lingkungan.

Melalui laporan ini, akan dibahas lebih dalam mengenai pengukuran kinerja efisien dan efektifitas anggaran pemerintah di DKI Jakarta. Dengan analisis yang komprehensif, diharapkan laporan ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya evaluasi pengukuran kinerja anggaran belanja daerah yang baik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah merupakan rencana keuangan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu tahunan pemerintah daerah. Anggaran belanja daerah dijadikan sebagai alat ukur kemandirian keuangan pemerintahan daerah. Anggaran belanja ini digunakan untuk mendanai semua kebutuhan operasional, pembangunan, serta pengeluaran lainnya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan Pembangunan di daerah. Anggaran belanja daerah terdiri dari beberapa jenis belanja di antaranya

1. Belanja operasional (Belanja Rutin)

Anggaran ini mencangkup biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintahan daerah agar dapat menjalankan fungsi operasionalnya Belanja uopersional meliputi:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang dan jasa,
- c. Belanja bunga,
- d. Belanja subsidi,
- e. Belanja hibah,
- f. Belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal (Investasi)

Anggaran merujuk pada pengeluaran yang digunakan untuk membeli atau pembangunan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan peningkatan kualitas layanan di daerah. Belanja modal bertujuan untuk menciptakan atau memperbaiki aset yang dapat meningkatkan kapasitas ekonomi dan sosial daerah dalam jangka panjang. Belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah
- b. Belanja peralatan dan mesin
- c. Belanja gedung dan bangunan
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja aset tetap lainnya

3. Belanja Tak Terduga (BTT)

Alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi pengeluaran yang tidak terencana atau mendesak yang timbul selama tahun anggaran. BTT digunakan untuk menghadapi keadaan darurat atau situasi yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam, wabah penyakit, atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan pembiayaan segera.

2.2 Efektifitas

Efektifitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau aktivitas mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Efektifitas menilai apakah hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan tanpa memperhatikan seberapa banyak sumber daya yang digunakan. Efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang telah dicapai oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas dan waktu, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu (Shofiana,2020).

Dalam ekonomi, efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik target kualitas dan waktu pencapaian diukur dari besar persentase target yang dicapai. Pencapaian target *output* dapat diukur dengan membandingkan anggaran seharusnya (AS) dengan realisasi anggaran (RA), dan jika $AS > RA$, maka kesimpulan itu efektif.

Dapat disimpulkan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target disebut efektifitas. Efektifitas mengacu pada sejauh mana suatu kegiatan,program dapat menghasilkan hasil atau dampak yang diharapkan dengan perlu adanya perencanaan yang tepat serta pengawasan dan evaluasi yang berkala.

2.3 Efisiensi

Efisiensi anggaran merupakan penggunaan anggaran yang optimal, karena sumber daya (dana, waktu, dan tenaga)digunakan secara bijaksana. Efisiensi anggaran berarti bahwa anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan hasil yang maksimal dengan biaya yang terendah mungkin. Efisiensi mengukur sejauh mana pengeluaran anggaran menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, semakin rendah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil lebih baik semakin efisien anggaran tersebut.

Efisiensi anggaran berarti pencapaian tujuan atau sasaran dengan menggunakan jumlah dana yang tepat dan dalam jumlah yang paling sedikit. Artinya, anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang memberikan dampak maksimal untuk pemerintahan tanpa ada pemborosan yang tidak perlu sehingga dalam mencapainya perlu perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang adalah faktor yang pertama untuk mencapai efisiensi anggaran.

Pengukuran efisiensi anggaran sangat penting karena memungkinkan suatu instansi untuk mengevaluasi apakah program telah memenuhi syarat dengan pendanaan yang serendah-rendahnya atau tidak.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Analisis

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan menggunakan angka. Analisis belanja daerah diperlukan untuk menentukan apakah APBD telah digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis maka perlu dilakukan analisis belanja daerah.

3.2 Metode Pengukuran

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka hasil anggaran belanja tidak efisien.
2. Jika hasil perhitungan antara 90% hingga 100%, maka hasil anggaran belanja kurang efisien.

3. Jika hasil perhitungan antara 80% hingga 90%, maka hasil anggaran belanja cukup efisien.
4. Jika hasil perhitungan antara 60% hingga 80%, maka hasil anggaran belanja efisien.
5. Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka hasil anggaran belanja sangat efisien.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efesiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perhitungan lebih dari 100%, maka hasil anggaran belanja sangat efektif.
2. Jika hasil perhitungan antara 90% hingga 100%, maka hasil anggaran belanja efektif.
3. Jika hasil perhitungan antara 80% hingga 90%, maka hasil anggaran belanja cukup efektif.
4. Jika hasil perhitungan antara 60% hingga 80%, maka hasil anggaran belanja kurang efektif.
5. Jika hasil perhitungan dibawah 60%, maka hasil anggaran belanja tidak efektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Harus menjalankan realisasi *budget* yang telah ditetapkan. Jika *budget* tidak terserap secara efektif, standar efesiensi dan efektivitas tidak akan tercapai.

Peran transparansi laporan keuangan dan pengukuran tingkat efesiensi dan efektivitas penyerapan anggaran DKI Jakarta. Oleh karena itu, data tentang realisasi

anggaran belanja dan anggaran belanja dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Data ini dapat ditemukan dalam Laporan Realisasi Anggaran, yang dapat ditemukan di LRA provinsi DKI Jakarta.

4.2.1 Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja DKI Jakarta Periode 2020-2023

Sebagaimana ditunjukkan oleh Laporan Realisasi provinsi DKI Jakarta periode 2020 sampai 2023, maka dapat dilakukan perhitungan tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 1) Tingkat Efisiensi Tahun 2020

$$= \frac{36.635.712.440.982}{51.716.860.929.662} \times 100\%$$

$$= 70,84\%$$
- 2) Tingkat Efisiensi Tahun 2021

$$= \frac{47.170.728.284.018}{61.231.460.250.253} \times 100\%$$

$$= 77,04\%$$
- 3) Tingkat Efisiensi Tahun 2022

$$= \frac{50.126.683.871.520}{64.380.358.560.086} \times 100\%$$

$$= 77,86\%$$
- 4) Tingkat Efisiensi Tahun 2023

$$= \frac{52.659.481.001.464}{66.414.163.147.914} \times 100\%$$

$$= 79,29\%$$

Tabel, 1

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Periode	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Tingkat efisiensi (%)	Kriteria
1	2020	36.635.712.440.982	51.716.860.929.662	70,84%	Efisien
2	2021	47.170.728.284.018	61.231.460.250.253	77,04%	Efisien

3	2022	50.126.683.871.520	64.380.358.560.086	77,86%	Efisien
4	2023	52.659.481.001.464	66.414.163.147.914	79,29%	Efisien
	Rata - Rata			76,26%	Efisien

Sumber: LRA Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran belanja daerah pada tabel 2 diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dari periode 2020 hingga 2023 secara keseluruhan Efisien. Tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2020 adalah 70,84% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan dengan efisien. Tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2021 adalah 77,04% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efisien. Selanjutnya tingkat efisiensi anggaran tahun 2022 adalah 77,86% yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efisien. Tahun 2023 tingkat presentase efisiensi anggaran belanja adalah 79,29% menunjukkan bahwa penyerapan anggaran efisien.

4.2.2 Analisis Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja DKI Jakarta Periode 2020-2023

Sebagaimana ditunjukkan oleh Laporan Realisasi provinsi DKI Jakarta periode 2020 sampai 2023, maka dapat dilakukan perhitungan tingkat efektivitas sebagai berikut:

1) Tingkat Efektivitas Tahun 2020

$$= \frac{51.716.860.929.662}{58.579.713.267.668} \times 100\%$$

$$= 88,28\%$$

2) Tingkat Efisiensi Tahun 2021

$$= \frac{61.231.460.250.253}{69.605.015.911.264} \times 100\%$$

$$= 87,97\%$$

3) Tingkat Efisiensi Tahun 2022

$$= \frac{64.380.358.560.086}{76.487.403.736.118} \times 100\%$$

$$= 84,17\%$$

4) Tingkat Efisiensi Tahun 2023

$$= \frac{66.414.163.147.914}{71.788.440.132.086} \times 100\%$$

$$= 92,51\%$$

Tabel, 2**Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta**

N o	Perio de	Anggaran (Rp)	Realissi Belanja (Rp)	Tingkat efektivit as (%)	Kriteri a
1	2020	58.579.713.267.668	51.716.860.929.662	88,28%	Cukup Efektif
2	2021	69.605.015.911.264	61.231.460.250.253	87,97%	Cukup efektif
3	2022	76.487.403.736.118	64.380.358.560.086	84,17%	Cukup Efektif
4	2023	71.788.440.132.086	66.414.163.147.914	92,51%	Efektif
	Rata – Rata			88,23%	Cukup Efektif

Sumber: LRA Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja anggaran belanja daerah pada tabel diatas diketahui bahwa penyerapan anggaran Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta dari periode 2020 hingga 2023 secara keseluruhan Efektif. Tingkat efektifitas penyerapan anggaran daerah pada tahun 2020 adalah 88,28%, yang menunjukkan penyerapan anggaran yang cukup efektif. Tingkat efektifitas anggaran 2021 adalah 87,97%, yang menunjukkan penyerapan anggaran yang cukup efektif. Tingkat efektifitas anggaran 2023 adalah 92,51%, yang menunjukkan penyerapan anggaran yang cukup efektif.

Berdasarkan pengukuran kinerja anggaran daerah DKI Jakarta periode tahun 2020 sampai tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan. Bahwa kesimpulan rata-rata yang didapat selama periode 4 tahun terakhir dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) DKI Jakarta sebesar 88,23% dengan hasil kinerja yang cukup efektif. Hal ini membuktikan bahwa

pemerintah daerah DKI Jakarta telah cukup melakukan efektifitas dalam anggaran belanja.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah pada makalah ini mengenai Analisis Pengukuran Kinerja Efisien dan Efektivitas Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode 2020-2023, dengan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Anggaran belanja provinsi DKI Jakarta periode tahun 2020-2023, secara keseluruhan telah diproses dengan baik. Dari hasil pembahasan terbukti jika anggaran belanja tahun 2020-2023, dikategorikan efisien. Membuktikan jika provinsi DKI Jakarta efisien dalam menggunakan dana yang ada namun tetap menghasilkan hasil yang optimal.
2. Pengukuran Anggaran belanja DKI Jakarta 2020, 2021, dan 2022 sudah dapat dianggap efektif karena tingkat dan kriteria efektifitasnya bervariasi dari tahun 2020 hingga 2023. Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2023 dan tingkat efektifitas terendah terjadi pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi tingkat efektifitas tertinggi dengan presentase sebesar 92,51%. Selanjutnya dapat dinyatakan jika DKI Jakarta berhasil mencapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan hasil nyata yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

5.2 Saran

Untuk provinsi DKI Jakarta agar anggaran belanja untuk tahun berikutnya lebih efisien dan efektif. Dan disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan anggaran untuk mengukur efektifitas dan efisiensinya. Pengawasan internal yang ketat serta audit oleh Lembaga independent harus dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan dan tidak ada pemborosan dana.

DAFTAR REFERENSI

- Efriandi, Kurnia, R., Putra, R. Y., & Syukria, A. (2022). Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Imam Bonjol Padang Efriandi Rahmat Kurnia Romy Yunika Putra Alfi Syukria. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(2), 77–92.
- Fadilah, M. N., & Dian Anita. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2023. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(4), 2457–2466. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2644>
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1433–1441.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 1–10.
- Putri, F. (2023). Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 18–19.
- Saparudin, M. (2024). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Untuk Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 359–367. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i2.1357>
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Syam, S. (2020). Pengaruh Efektifitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(2), 128–152.